

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu menjadi sebuah keharusan absolut. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang hukum dan politik, hingga ekonomi, sosial, dan budaya. Pelaksanaan HAM harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, ataupun jenis kelamin. Selama periode itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) muncul sebagai pernyataan yang berlaku secara universal, diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Deklarasi ini menggarisbawahi pemahaman dan pengakuan bersama masyarakat internasional akan pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan semua individu, termasuk perempuan.¹ Meskipun instrumen hukum internasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas melarang diskriminasi terhadap perempuan, isu ini masih menjadi perdebatan hangat di komunitas internasional. Dalam konteks ini, Iran kerap menerima kritik atas catatan buruknya dalam hal kesetaraan gender dan pelanggaran HAM terhadap perempuan. Pada awal mulanya, system pemerintahan Iran terbentuk secara Monarki dengan dipimpin oleh Syah Mohammad Reza Pahlevi. Pada era Rezim Shah Pahlevi konflik, pertentangan, penghianatan, dan juga korupsi mulai menjalar di negara republic islam ini. Tentu saja dalam hal ini menimbulkan sebuah kesenjangan atau ketimpanga yang cukup signifikan dan mencapai puncaknya dengan Meletusnya

¹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, n.d.

revolusi islam iran yang berlangsung pada januari 1978 hingga februari 1979 yang juga di pimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini.

Keikutsertaan mereka di dalam ruang public, Dalam hal ini tentu saja kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan semangat revolusi. Sesaat setelah revolusi yakni tepat selama satu bulan , Khomeini mewajibkan semua perempuan untuk mengenakan jilbab atau kerudung di tempat kerja, namun kebijakan ini di dalam penerapannya juga di wajibkan kepada Wanita non-muslim.² Oleh sebab itu kebijakan tersebut tentu saja memicu penolakan dari perempuan non muslim karena aturan dari kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka.³ Dalam penegakan kebijakan tersebut Khomeini mulai menjalankan Adaya polisi moral. Pemberlakuan ini kemudian menyebabkan terciptanya perpecahan antar perempuan yakni konservatif, sekuler, dan kelompok lainnya.

Protes yang sedang berlangsung bertahan di beberapa kota di seluruh Iran. Katalisator dari demonstrasi ini adalah kematian yang tidak menguntungkan dari seorang wanita muda Kurdi, Mahsa Amini, berusia 22 tahun. Penangkapan Mahsa oleh polisi moral, juga disebut sebagai "Patroli Bimbingan", menjadi pemicu protes yang meluas ini. Dia ditahan oleh polisi moral karena dugaan pelanggaran terkait pakaiannya, khususnya cara dia mengenakan jilbab, yang dianggap tidak pantas. Penegakan peraturan tersebut berada di bawah yurisdiksi Unit Polisi yang

² Shohreh Sadeghi et al., "Social-Cultural Barriers of Muslim Women Athletes: Case Study of Professional Female Athletes in Iran," *journal of management practices , humanities and social sciences* 2 (2018), <http://www.global-jws.com/ojs/index.php/global-jws/article/view/7>.

³ Ali Akbar Mahdi, "The Iranian Women's Movement: A Century Long Struggle," *ResearchGate.com* 4 (2004), https://www.researchgate.net/publication/228021795_The_Iranian_Women's_Movement_A_Century_Long_Struggle.

dikenal sebagai Patroli Bimbingan atau Gasht-e Ershad.⁴ Mahsa diketahui mengenakan kerudung terlalu longgar sehingga tidak sesuai dengan aturan berpakaian di Iran. Sebagaimana sesuai dengan berlakunya rezim pasca revolusi tahun 1979 yang berisikan mengenai aturan khusus tentang cara berpakaian perempuan Iran serta di atur dalam konstitusi negara pada Mullah tersebut. Perlu dicatat bahwa sebelum revolusi Islam pada tahun 1979, di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat, terdapat praktik umum di kota Teheran di mana banyak perempuan yang tidak memakai kerudung dan mengenakan rok mini. Meskipun demikian, perempuan Muslim di Iran pada saat itu juga banyak yang memilih untuk memakai hijab.⁵

Tepat setelah meninggalnya Mahsa Amini memancing emosi massa serta memantik serangkaian protes bagi para demonstran yang sebelumnya sudah sering turung ke jalan dengan alasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sejak tahun 2019 silam.⁶ Demonstrasi yang diketahui berlangsung selama berhari-hari diseluruh penjuru negeri Iran dilakukan dengan cara yang sangat brutal yakni para perempuan diketahui melepas hijab yang mereka pakai adapula sampai terang-terangan memotong rambut di depan umum. Aksi selanjutnya yang dilakukan adalah dengan membakar kendaraan polisi. Aksi yang dilakukan oleh para pendemo tersebut dengan uniknya dilakukan secara serentak dan bersamaan

⁴ “Polisi Moral Iran Dalam Sorotan Setelah Mahsa Amini Tewas - ‘Saya Sering Menangis Saat Menahan Warga,” *BBC.NEW.SINDONESIA*, last modified 2022, accessed June 27, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62980759>.

⁵ Ibid.

⁶ Matius Alfons, “Demo Kenaikan Harga BBM Masih Terjadi Di Iran, Pedemo Jarah Toko,” *Detiknews.Com*, last modified 2019, accessed June 27, 2023, <https://news.detik.com/internasional/d-4789694/demo-kenaikan-harga-bbm-masih-terjadi-di-iran-pedemo-jarah-toko>.

bahkan di balik gerakan gerakan lainnya yang telah terjadi di Iran. Gerakan Mahsa Amini menghasilkan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di Iran. Namun uniknya, Gerakan Mahsa Amini ini tidak mempunyai pemimpin. Gerakan ini juga bukan hanya mencakup aturan undang undang mengenai hijab/jilbab namun juga berbicara tentang gejolak ekonomi, inflasi hingga pengangguran.⁷

Penyebab dari meninggalnya Mahsa Amini masih menjadi sebuah isu polemic serta juga memunculkan banyak versi, terlebih khususnya di beberapa pemberitaan Barat serta media Timur Tengah yang kontra dengan pemerintahan Iran satu suara dalam mengambil kesimpulan bahwa Mahsa Amini meninggal setelah mendapat penyiksaan dari Polisi Moral. Di tambah lagi dengan demonstrasi yang terjadi hingga saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dimulai dengan unjuk rasa dengan beberapa Gerakan anti-rezim dengan adanya lusinan orang berkumpul di depan rumah sakit Kasra di Teheran yang rumah sakit tempat meninggalnya Mahsa pada tanggal 16 september. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Anti-Rezim tersebut terus berlangsung sampai minggu ke tujuh masih belum muncul tanda tanda akan berakhir.⁸ Hingga memasuki bulan ketiga Gerakan Anti -Rezim Demonstrasi serta pemogokan di seluruh negeri kian menggemparkan Rezim Iran, sehingga menghadirkannya salah satu ancaman paling eksistensial yang dihadapinya sejak perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. ⁹Dengan

⁷ S.FARAZ Hussain Naqvi and Ammara Zaheer, "Mahsa Amini and the Anti-Hijab Protests in Iran : A Post-Truth," *Regional Studies* 40, no. 2 (2022): 36–57.

⁸ Niels de Hoog and Elena Morresi, "Mapping Iran's Unrest: How Mahsa Amini's Death Led to Nationwide Protests," <https://www.theguardian.com/>, last modified 2022, accessed June 27, 2023, <https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2022/oct/31/mapping-irans-unrest-how-mahsa-aminis-death-led-to-nationwide-protests>.

⁹ Zachary Coles, "Data Analysis of the Mahsa Amini Protest Movement," *Www-Criticalthreats-Org*, last modified 2022, accessed June 27, 2023, <https://www-criticalthreats->

melihat dari efek yang ditimbulkan oleh Gerakan Mahsa Amini yakni dengan protes yang belum pernah terjadi di sepanjang Sejarah Iran, serta dengan melihat bahwa Gerakan tersebut juga menyinggung mengenai gejolak ekonomi serta inflasi yang terjadi di Iran maka peneliti akan membahas mengenai Analisa Gerakan Mahsa Amini dalam dalam menentang seksisme di Iran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut ini dapat diperoleh berdasarkan konteks yang telah disebutkan di atas yakni:

Bagaimana Gerakan Mahsa Amini dalam menentang aturan seksisme di Iran?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Gerakan Mahsa Amini dalam menentang seksisme di Iran tahun 2022-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini dikemudian hari akan bisa di jadikan sebagai referensi bagaimana peran dari Gerakan Mahsa Amini dalam menentang seksisme di Iran tahun 2022 hingga 2023.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bernilai, memperkaya khazanah pengetahuan, dan menyajikan titik acuan bagi para peneliti di masa depan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menggunakan penelitian ini sebagai sumber utama dan masukan tambahan untuk upaya penelitian lain yang mendalami analisis peran gerakan Mahsa Amini dalam menentang seksisme pada tahun 2022 hingga 2023.

1.4 Penelitian Terdahulu

Isu-isu yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini telah dibahas oleh sejumlah penelitian lain. Banyak penelitian yang memiliki kesamaan dan diskusi yang relevan. Namun, setiap penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh para akademisi di sini masih dalam koridor mengenai gerakan menolak seksisme di Iran serta masih memiliki kesamaan dalam pembahasan.

Studi literatur pendahuluan yang dilaksanakan oleh Mutiara Agustin dkk, dengan judul "Dari Swiss ke Iran: Dalam Upaya Mendukung Gerakan Sosial untuk Memenuhi Hak Asasi Perempuan Iran melalui Organisasi Non-Pemerintah Swiss", mengkaji secara mendalam tentang gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk menggalakkan serta melindungi hak-hak fundamental kaum perempuan di Iran. Studi ini secara spesifik berfokus pada peran serta kontribusi signifikan yang diberikan oleh Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Swiss dalam menyokong perjuangan tersebut.

Penelitian tersebut menyoroti pentingnya menangani isu-isu perempuan dalam bidang politik, sosial, agama, dan budaya, termasuk hal-hal seperti aturan berpakaian di Iran. Perhatian yang dikumpulkan secara global oleh posisi perempuan di Iran menggarisbawahi perlunya menanggapi tindakan yang mengancam atau melanggar diskriminasi terhadap perempuan. Situasi ini semakin diperumit dengan penerapan hukum Islam di Iran.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai upaya yang dicanangkan oleh Organisasi Non-Pemerintah dalam rangka mendukung gerakan sosial yang memperjuangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kaum perempuan di Iran. Dukungan tersebut datang dari negara Swiss, yang secara konsisten menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi HAM secara universal. Swiss juga secara aktif mengimplementasikan langkah-langkah nyata guna meningkatkan efektivitas dan konsistensi negara tersebut dalam mempromosikan HAM di kancah internasional.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan tentunya di bagian pembahasan yakni menjelaskan mengenai bagaimana kondisi para perempuan yang ada di Iran di mana mereka mendapatkan Tindakan diskriminasi dari kebijakan yang berasal dari negara mereka sendiri.

Kajian Literatur yang kedua yakni jurnal dari Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Widiarti et al. berjudul "Upaya Iran Green Movement dalam Mendorong Pemerintah Iran untuk Mengimplementasikan Hak Perempuan melalui Media Baru" menguraikan bagaimana Iran Green Movement berupaya mengangkat hak-hak

¹⁰ Ika Riswanti Putranti Mutiara Agustin Br. Haloho, Reni Windiani, "DARI SWISS KE IRAN: 'DALAM UPAYA Mendukung Gerakan Sosial Pemenuhan HAM Bagi Perempuan Iran Melalui Non Government Organization Swiss'" 9 (2016): 1-23.

¹¹ Ibid.

perempuan di Iran untuk melawan tindakan diskriminasi. Upaya yang dilakukan oleh Iran Green Movement melibatkan protes guna menuntut hak-hak perempuan di Iran dengan tujuan memaksa pemerintah mencabut kebijakan yang merugikan hak-hak mereka, seperti aturan hijab yang ketat dan pembatasan pakaian. Namun, protes tersebut tidak terkendali dan menyebabkan korban jiwa.

Selanjutnya, upaya dilakukan melalui aksi protes di platform internet seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan situs web untuk menyebarkan tautan berisi gambar atau video. Di samping itu, mereka memelopori kampanye bertajuk "The One Million Signature Campaign". Kampanye ini bertujuan untuk mendesak pemerintah Iran agar merevisi kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Kampanye ini mengumpulkan satu juta tanda tangan baik dari dalam negeri maupun internasional. Kesamaan dengan penelitian ini terlihat pada pembahasan mengenai kondisi perempuan di Iran yang mengalami tindakan diskriminasi akibat kebijakan negara mereka sendiri.

Kajian literature ketiga yang disusun oleh Moh Choirul Anam berjudul "Peran Perempuan di Iran Pasca Revolusi 1979 dalam Perspektif Shirin Ebadi". Tesis ini mengkaji inisiatif-inisiatif yang diupayakan oleh Organisasi Non-Pemerintah (Non-Government Organization) dalam rangka mendukung Gerakan sosial untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kaum perempuan di Iran. Dukungan tersebut datang dari Swiss, sebuah negara yang secara proaktif berkomitmen untuk melindungi HAM secara universal. Swiss juga mengimplementasikan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi negaranya dalam mempromosikan HAM di kancah internasional.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kontribusi Organisasi Non-Pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak fundamental bagi perempuan Iran melalui Gerakan sosial yang ada. Kajian ini juga menyoroti peran penting Swiss sebagai negara yang aktif dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM universal dan menerapkan tindakan konkret untuk memperkuat efektivitas serta konsistensi mereka dalam mempromosikan HAM di luar batas negaranya.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran perempuan di Iran setelah revolusi 1979 dari perspektif Shirin Ebadi. Perspektif ini menyoroti cara pemerintah Iran membatasi peran perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama, peran perempuan sangat terbatas melalui kebijakan diskriminatif yang merampas hak-hak mereka. Penelitian Moh Choirul Anam memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu fokus pada pembahasan kebijakan pemerintah Iran yang memperpanjang diskriminasi terhadap perempuan.

Jurnal keempat yang ditulis oleh Kiki Mikail dengan judul "Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979" membahas tentang perjuangan politik kaum perempuan setelah terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa Undang-Undang Republik Islam Iran secara ideal telah mengatur posisi perempuan serta hak-hak yang dapat mereka peroleh, baik dalam konteks sosial maupun politik. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Iran sebelum revolusi tahun 1979, di mana perempuan tidak hanya dipandang sebagai alat reproduksi, tetapi juga sering mengalami eksploitasi dan terpengaruh oleh budaya asing.

Sebelum terjadinya revolusi, pandangan masyarakat Iran terhadap perempuan cenderung konvensional dan terbelakang. Paradigma lama yang berlaku pada saat itu menempatkan perempuan sebagai properti laki-laki, sehingga posisi laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Namun, setelah revolusi Islam tahun 1979, terjadi perubahan signifikan dalam kedudukan dan hak-hak perempuan di Iran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Islam Iran. Akibatnya, hanya pria yang dapat memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, sementara wanita dianggap tidak cocok untuk terlibat dan memiliki peran dalam berbagai bidang sosial. Penelitian ini juga mencakup analisis tentang kebijakan Iran yang dianggap merugikan perempuan.¹²

Dalam kajian literatur kelima yang ditulis oleh Imam Nawawi dengan judul "Peran Perempuan dalam Revolusi Iran", dikaji secara komprehensif keterlibatan perempuan dalam Revolusi Islam Iran. Studi ini menyoroti kompleksitas masalah tersebut, yang terbukti melalui kebijakan politik yang kontraproduktif yang diterapkan oleh rezim Pahlevi. Sejak pertengahan abad ke-20 dan seterusnya, muncul perlawanan dan dukungan terhadap pemerintah. Perlawanan ini timbul sebagai respons terhadap kekurangan, praktik diskriminatif, dan ketegangan dengan nilai-nilai sosial yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah. Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada masa rezim Pahlavi, terdapat upaya Westernisasi yang tidak produktif di Iran. Di saat yang sama, pemerintah memfasilitasi peluang besar bagi kekuatan asing untuk berinvestasi dan

¹² Kiki Mikail, "POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979," *Addin* 9, no. 2 (2015): 253–276.

mempengaruhi Iran, yang pada akhirnya memperkuat imperialisme kapitalis. Akibatnya, Iran mengalami kemajuan yang signifikan dalam pembangunan fisik dan militer. Pabrik dan perusahaan yang mengutamakan keuntungan tumbuh pesat, sehingga mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.¹³

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul dan nama peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil analisa
1.	Mutiara Agustin. Dkk . Judul : DARI SWISS KE IRAN: “DALAM UPAYA Mendukung GERAKAN SOSIAL PEMENUHAN HAM BAGI PEREMPUAN IRAN MELALUI NON GOVERNMENT ORGANIZATION SWISS”	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan proses penulisan yang digunakan.	Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa terbuktinya dengan kehadiran Swiss dapat mendorong pemenuhan hak asasi manusia terlebih khusus terhadap perempuan.
2.	Nadia Widianti, dkk . dengan judul Upaya Iran Green Movement dalam Menekan Pemerintah Iran untuk Mengimplementasikan Hak Perempuan melalui New Media.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menguraikan dan mengungkapkan proses penulisan yang dilakukan.	Hasil dari penelitian ini adalah platform media sosial baru seperti Twitter, YouTube, dan Web – Web lainnya sangat berperan penting di dalam melakukan mobilisasi massa, membentuk ruang publik, mendapatkan dukungan yang

¹³ I NAWAWI, “Peran Perempuan Dalam Revolusi Iran” (2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16151>.

No	Judul dan nama peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil analisa
			masif serta menyebarkan informasi kepada publik.
3.	<p>Moh Choirul Anam dengan judul PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI</p>	<p>Penelitian ini melibatkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat analitis deskriptif, dengan tujuan menguraikan pemikiran Shirin Ebadi dan menganalisisnya secara kritis.</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Iran telah menunjukkan adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Shirin Ebadi yang menyatakan bahwa pemerintah Iran telah membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.</p>
4.	<p>Kiki Mikail dengan judul Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979</p>	<p>Jenis penelitian dari penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar bisa menguraikan serta mengungkapkan metode penulisan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan yang di anut oleh pemerintah Iran pasca revolusi 1979 nyatanya mampu merugikan pihak perempuan. Kemudian akibat dari ketimpangan tersebut melahirkan sebuah gerakan politik perempuan di republik islam Iran. Dengan tujuan untuk memberla</p>

No	Judul dan nama peneliti	Jenis penelitian dan alat analisa	Hasil analisa
			hak-hak yang mendukung HAM dan kesetaraan Gender.
5.	Imam Nawawi dengan judul PERAN PEREMPUAN DALAM REVOLUSI IRAN .	Penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif yang berfokus pada analisis historis. Metode yang digunakan adalah metode historis atau sejarah, yang melibatkan proses kritis-analitis untuk menguji dan menganalisis data yang terdapat dalam rekaman dan peninggalan masa lalu; berdasarkan data yang telah dikumpulkan.	Hasil dari penelitian ini ialah dengan bergabungnya perempuan di dalam revolusi Islam Iran merupakan sebuah kejadian yang lengkap di mana, sebuah kompleksitas persoalan dapat di lihat melalui kontra-produktifnya kebijakan politik rezim pahlevi.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Konsep Perilaku Kolektif

Dalam karya M. Jasper yang berjudul "Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action" yang terbit pada tahun 2010, ia melakukan analisis terhadap perkembangan teori-teori gerakan sosial. Menurut pendapatnya, teori-teori gerakan sosial yang sebelumnya berpengaruh telah mengalami diskreditasi dan mulai ditinggalkan. Namun demikian, Jasper juga mengakui adanya pendekatan-pendekatan tertentu yang berhasil mengintegrasikan teori budaya dan tindakan emosional ke dalam analisis gerakan sosial. Integrasi teori budaya dan

tindakan emosional ini memungkinkan para analis untuk melakukan rekonstruksi gerakan sosial secara lebih empiris, dimulai dari tingkat mikro hingga tingkat makro. Penting untuk diketahui bahwa gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan melibatkan interaksi antar anggota masyarakat.¹⁴

Perilaku kolektif memicu perubahan sosial. Perilaku ini meliputi gerakan sosial sebagai upaya gigih dan terorganisir oleh banyak orang untuk membawa perubahan atau menolak suatu keadaan. Baik perilaku kolektif maupun gerakan sosial terjadi di luar kerangka kehidupan sehari-hari dan melanggar norma yang ada. Meski memiliki kemiripan, keduanya berbeda: perilaku kolektif spontan dan tidak terorganisir, sedangkan gerakan sosial memiliki struktur internal dan tindakan terarah.

Gerakan sosial adalah fenomena yang mencerminkan kekuatan masyarakat dalam menggalang perubahan sosial dan politik. Dalam perspektif sosiologi, gerakan sosial sering kali dilihat sebagai upaya terorganisir oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu reformasi kebijakan, perubahan nilai-nilai sosial, atau perbaikan kondisi lingkungan. Pendekatan gerakan sosial melalui perilaku kolektif adalah salah satu cara untuk memahami dinamika dan mekanisme di balik munculnya, berkembangnya, dan keberhasilannya. Perilaku kolektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama, yang berbeda dari perilaku individu sehari-hari. Ini bisa berupa protes, demonstrasi, boikot, atau bentuk aksi lainnya

¹⁴ Joni Rusmanto Rusmanto, *GERAKAN SOSIAL, Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan Dan Kelemahan* Desember 2012 (Palangkaraya: ResearchGate.com, 2012), https://www.researchgate.net/publication/323238283_GERAKAN_SOSIAL_Sejarah_Perkembangan_Teori_antara_Kekuatan_dan_Kelemahan.

yang melibatkan partisipasi banyak orang. Menurut Smelser (1962), perilaku kolektif adalah tindakan sosial yang terjadi sebagai respons terhadap kondisi tertentu yang menghasilkan ketegangan atau kekacauan sosial¹⁵. Perilaku ini sering kali diorganisir secara spontan dan dapat berubah-ubah dengan cepat.

Perilaku kolektif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis gerakan sosial, yang merupakan bentuk dari perilaku kolektif yang terorganisir dan berorientasi pada perubahan sosial¹⁶. Gerakan sosial tidak hanya menyoro masalah sosial, tetapi juga bertujuan untuk memobilisasi masyarakat dalam mencapai perubahan yang diinginkan.

Salah satu teori klasik mengenai perilaku kolektif adalah teori dari Gustave Le Bon. Dalam bukunya, "The Crowd: A Study of the Popular Mind" (1895), Le Bon menyatakan bahwa individu dalam kerumunan kehilangan rasa tanggung jawab pribadi dan menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh emosi dan tindakan orang lain di sekitar mereka. Menurut Le Bon, perilaku kolektif dalam kerumunan dapat bersifat irasional dan sering kali mengarah pada tindakan kekerasan atau destruktif¹⁷.

Namun, teori Le Bon ini kemudian dikritik oleh berbagai ahli karena dianggap terlalu deterministik dan tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial yang lebih luas. Salah satu kritik utama datang dari Herbert Blumer, yang mengembangkan konsep perilaku kolektif yang lebih dinamis. Dalam pandangan

¹⁵ Smelser, N. J. (1962). *Theory of Collective Behavior*. Free Press.

¹⁶ Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Rasibook.

¹⁷ Le Bon, G. (1895). *The Crowd: A Study of the Popular Mind*.

Blumer, perilaku kolektif muncul melalui proses interaksi sosial dan komunikasi di antara individu. Blumer menekankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana makna dibentuk dan diinterpretasikan dalam kelompok untuk memahami tindakan kolektif¹⁸.

Gerakan sosial dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif yang lebih terorganisir. Gerakan sosial memiliki struktur dan tujuan yang lebih jelas dibandingkan dengan bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti kerusuhan atau panik massa. Salah satu teori yang penting dalam studi gerakan sosial adalah teori mobilisasi sumber daya, yang diperkenalkan oleh John D. McCarthy dan Mayer N. Zald pada tahun 1977¹⁹.

Stolley (2005: 179) menyatakan bahwa perilaku kolektif berkaitan dengan proses perubahan sosial. Sosiolog memberi perhatian pada perubahan sosial yang terjadi melalui perilaku ini. Dalam mengkaji perubahan sosial, salah satu fokus utama adalah perilaku kolektif, yang biasanya bersifat spontan dan menentang norma yang mapan. Bentuknya termasuk kerumunan, desas-desus, opini publik, panik, dan mode.²⁰

Perilaku kolektif memegang peranan penting dalam mendorong perubahan sosial. Perilaku ini mencakup berbagai bentuk aksi bersama oleh individu yang merasa bahwa perubahan diperlukan, sering kali terjadi di luar kerangka kehidupan sehari-hari dan melanggar norma-norma yang ada. Sebagai contoh, gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif yang lebih terorganisir dan

¹⁸ Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*.

¹⁹ McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241

²⁰ Stolley, K.S. (2005). *Sociology Basics*.

konsisten dalam upaya membawa perubahan besar atau menolak kondisi tertentu. Baik perilaku kolektif maupun gerakan sosial mencerminkan reaksi terhadap ketidakpuasan sosial dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok besar masyarakat.

Menurut Stolley, perilaku kolektif sering kali bersifat spontan dan mencerminkan penentangan terhadap norma-norma yang mapan. Bentuk-bentuk dari perilaku kolektif termasuk kerumunan (crowds), desas-desus (rumors), opini publik (public opinion), panik (panic), mode (fads), dan histeria massa (mass hysteria). Semua bentuk perilaku ini mencerminkan ketidakpuasan dengan keadaan saat ini dan keinginan untuk perubahan. Perilaku kolektif tidak terikat oleh norma-norma sosial konvensional dan sering kali terjadi dalam situasi di mana interaksi sosial minim.

Menurut Locher (2002:1), perilaku kolektif adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang dalam situasi yang tidak biasa. Ini dapat mencakup tindakan yang tidak diharapkan dalam kondisi normal. Perilaku kolektif sering terjadi di luar situasi yang diharapkan oleh masyarakat umum dan bertentangan dengan standar-standar perilaku normal. Perilaku ini bisa bersifat menyimpang (deviant behavior) atau ekspresif (expressive behavior), tergantung pada konteks dan tujuannya. Konsep ini juga digunakan oleh sosiolog terkenal seperti Robert E. Park dan Herbert Blumer, yang melihat perilaku kolektif sebagai proses sosial yang tidak mencerminkan struktur formal seperti hukum, konvensi, atau lembaga.²¹

²¹ Locher, D.A. (2002). *Collective Behavior*.

Macionis (1999:603) mencatat bahwa perilaku kolektif didasarkan pada interaksi sosial yang terbatas, tidak memiliki batasan sosial yang jelas, dan menghasilkan norma yang lemah dan tidak konvensional²². Ini berarti bahwa tindakan-tindakan dalam perilaku kolektif sering kali tidak mengikuti aturan atau norma yang sudah ada, melainkan menciptakan norma-norma baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi.

Menurut Zanden (1988:566), perilaku kolektif dipandang sebagai cara berpikir (thinking), merasa (feeling), dan bertindak (acting) yang berkembang di antara sejumlah orang yang relatif baru dan tidak didefinisikan dengan baik. Sejarah manusia menunjukkan banyak episode perilaku kolektif, seperti kerusuhan (riots), histeria massa (mass hysteria), dan perilaku yang dianggap menyimpang. Perilaku kolektif sering kali muncul dalam konteks ketidakpuasan sosial yang meluas, di mana individu-individu merasa bahwa keadaan yang ada tidak lagi dapat diterima.²³ Perilaku kolektif merupakan fenomena penting dalam memahami dinamika perubahan sosial. Perilaku ini menunjukkan bagaimana individu-individu dalam masyarakat dapat bersatu untuk menentang norma-norma yang ada dan mendorong perubahan yang signifikan. Dengan memahami perilaku kolektif, kita dapat melihat bagaimana protes dan gerakan sosial dapat memicu reformasi dan transformasi dalam tatanan sosial. Perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesetaraan dalam masyarakat adalah esensial untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan sosial yang dimulai dari perilaku kolektif menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam membentuk masa depan masyarakat mereka.

²² Macionis, J.J. (1999). *Sociology*.

²³ Argenti, G. SEBUAH REVIEW TEORI GERAKAN SOSIAL.

Spencer (1982:491) menyatakan bahwa perilaku kolektif tidak dapat didefinisikan hanya sebagai tindakan spontan, tetapi juga melibatkan situasi di mana sejumlah orang beraksi bersama melawan norma-norma yang mapan. Perilaku ini sering kali mencerminkan keinginan untuk perubahan sosial dan perlawanan terhadap situasi yang dianggap tidak adil atau tidak memadai. Dan bentuk dari collective behavior ialah crowds, mobs, and riots and gossip, public opinion, panic and mass hysteria dan fashion and fads.²⁴ Dalam bentuk collective behavior yakni crowds memiliki tiga tipe yakni di antara nya ialah :

1. Kerumunan Kasual (Casual Crowd)

Kerumunan kasual terdiri dari individu-individu yang secara kebetulan berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Contohnya, kerumunan yang terbentuk saat menyaksikan kecelakaan lalu lintas.

2. Kerumunan Konvensional (Conventional Crowd)

Kerumunan konvensional tersusun atas individu-individu yang sengaja berkumpul dan terikat oleh norma-norma perilaku tertentu. Contohnya, para tamu undangan pernikahan, penonton konser musik, atau audiens dalam acara pembacaan puisi.

3. Kerumunan Ekspresif (Expressive Crowd)

Kerumunan ekspresif merupakan bentuk khusus dari kerumunan yang melibatkan ekspresi emosi para anggotanya. Contohnya, partisipan dalam pawai politik. Sementara itu terdapat perilaku kerumunan antara lain yakni,

²⁴ Carl J. Couch, "Collective Behavior: An Examination of Some Stereotypes." (2020), <https://psycnet.apa.org/record/1968-10439-001>.

- a. Mudah Disugesti: Anggota kerumunan mudah terpengaruh oleh pihak lain, terutama mereka yang memiliki otoritas.
- b. Destruktif: Kerumunan dapat melakukan tindakan merusak, seperti menyerang properti dan bahkan merenggut nyawa.
- c. Irasional: Perilaku kerumunan seringkali tidak logis dan didasari oleh emosi.
- d. Emosional: Emosi yang kuat menjadi ciri khas kerumunan.
- e. Mirip Gangguan Jiwa: Menurut beberapa ahli, perilaku kerumunan memiliki kemiripan dengan gejala penyakit mental.
- f. Didominasi Kelas Bawah: Kerumunan biasanya berasal dari kalangan bawah masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan.
- g. Spontan: Kerumunan dapat terbentuk secara tiba-tiba sebagai respons terhadap ketidakpuasan.
- h. Kreatif: Meskipun tidak menciptakan sistem sosial baru, kerumunan dapat menunjukkan kreativitas dalam aksinya.
- i. Kehilangan Kontrol: Orang-orang dalam kerumunan cenderung berperilaku tanpa kontrol diri.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep perilaku kolektif menurut Spencer (1982: 491) untuk menjelaskan bagaimana bentuk gerakan Mahsa Amini dalam proses pelaksanaannya menentang seksisme di Iran. Dengan berfokus pada bentuk *Expressive crowd* / yakni merupakan sebuah bentuk khusus dari kerumunan yang melibatkan ekspresi emosi para anggotanya atau partisipannya dengan melihat dari perilaku kerumunan dari gerakan Mahsa Amini yang dalam

pelaksanaannya berlangsung secara spontan maka hal tersebut selaras dengan perilaku kerumunan yang spontan. Di mana kerumunan tersebut dapat terbentuk secara tiba-tiba sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kebijakan atau norma dari pemerintah Iran terutama aturan wajib hijab.

1.5.2 Seksisme

Sejarah panjang patriarki memainkan peran penting dalam keberlanjutan seksisme. Patriarki mengacu pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam peran politik, ekonomi, dan sosial, yang mengarah pada marginalisasi perempuan. Simone de Beauvoir dalam bukunya "The Second Sex" (1949) menguraikan bagaimana perempuan secara historis diposisikan sebagai "Liyah," atau yang lain, yang secara inheren dianggap lebih rendah daripada laki-laki²⁵. Budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi sering kali memperkuat stereotip gender, di mana perempuan diharapkan untuk mengambil peran domestik dan merawat, sementara laki-laki diharapkan menjadi penyedia dan pemimpin.

Seksisme juga dipelajari dan diperkuat melalui proses sosialisasi. Menurut teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, individu belajar tentang peran gender melalui observasi dan peniruan model di sekitar mereka, seperti orang tua, guru, dan media. Media sering kali menggambarkan perempuan dan laki-laki dalam peran tradisional, yang memperkuat stereotip gender. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan peran gender yang kaku cenderung menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam interaksi mereka dengan orang lain.²⁶

²⁵ Rohmah, S., & Ilahi, R. P. (2021). Problem Gender dalam Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2), 193-206.

²⁶ Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*.

Albert Bandura, seorang psikolog terkenal, mengemukakan bahwa seksisme dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Dalam bukunya "Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory" (1986), Bandura menekankan bahwa individu menginternalisasi peran gender melalui proses belajar sosial. Misalnya, anak-anak belajar tentang peran gender dari orang tua, guru, dan media, yang kemudian membentuk pandangan mereka tentang apa yang dianggap sebagai perilaku maskulin dan feminin yang sesuai .

Teori feminis mengidentifikasi seksisme sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan patriarki yang secara sistematis menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Menurut teori ini, seksisme tidak hanya terbatas pada sikap atau tindakan individu, tetapi terakar dalam institusi sosial, hukum, ekonomi, dan budaya yang memperkuat dominasi maskulin atas feminin. Sebagai contoh, Rich (1980) dalam karyanya menyebutkan bahwa "seksisme adalah bagian dari sistem yang lebih luas yang mempertahankan ketimpangan gender."²⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, seksisme dapat termanifestasikan melalui stereotipe gender, ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Misalnya, perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan tinggi di dunia korporat karena adanya plafon kaca yang tidak terlihat bagi laki-laki. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur sosial yang didominasi oleh pria dapat menghalangi kemajuan perempuan.²⁸

Dari sudut pandang moral, seksisme pada dasarnya tidak adil karena tidak memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan adil kepada setiap individu

²⁷ Winarti, R. (2023). Tantangan Peran Wanita dalam Demokrasi di Masa Sekarang dan Yang Akan Datang. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 307-318.

²⁸ Purwanti, A. (2020). Kekerasan Berbasis Gender.

hanya berdasarkan gender. Hal ini melanggar prinsip memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dalam kasus Mahsa Amini, tuduhan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap prinsip moral mendasar ini, yang tidak hanya mencoreng reputasinya tetapi juga mencerminkan masalah sistemik dalam industri ini.

Kerangka moral yang menentang seksisme melampaui batas-batas hukum dan institusional. Konvensi ini menyerukan kepada individu dan organisasi untuk menjunjung standar etika yang mendorong inklusivitas dan kesetaraan. Dampak dari kegagalan mengatasi seksisme sangat besar, tidak hanya berdampak pada korban langsung namun juga melanggengkan stereotip yang merugikan dan membatasi kemajuan masyarakat menuju kesetaraan gender.

Dalam konteks kasus Mahsa Amini, keharusan moralnya jelas: menghadapi dan mengutuk seksisme dalam segala bentuknya. Hal ini tidak hanya membutuhkan akuntabilitas bagi para pelaku namun juga langkah-langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan di mana rasa hormat dan kesetaraan tidak dapat dinegosiasikan. Organisasi harus menerapkan kebijakan yang ketat terhadap diskriminasi dan pelecehan, memastikan bahwa semua masyarakat merasa aman dan dihargai tanpa memandang gender.²⁹

Selain itu, mengatasi seksisme memerlukan perubahan budaya yang menantang bias dan stereotip yang mengakar. Hal ini melibatkan peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang kesetaraan gender sejak usia dini dan pengembangan tempat kerja di mana keberagaman dirayakan dan didukung.

²⁹ Sitompul, L. U. (2021). Sexist Hate Speech Terhadap Perempuan Di Media: Perwujudan Patriarki Di Ruang Publik. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 3(3), 152-161.

Kasus Mahsa Amini menjadi pengingat serius akan perjuangan yang sedang berlangsung melawan seksisme dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara³⁰.

Dari sudut pandang filosofis, kutukan moral terhadap seksisme didasarkan pada teori etika yang menekankan keadilan, dan martabat manusia. Imperatif kategoris Immanuel Kant, misalnya, berpendapat bahwa individu harus bertindak dengan cara yang menghormati nilai inheren dan otonomi orang lain. Jika diterapkan pada kasus Mahsa Amini, perilaku apa pun yang merendahkan kedudukan profesional atau martabat pribadi perempuan akan dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip Kantian.³¹

Demikian pula, etika utilitarian, yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan, menggarisbawahi dampak negatif seksisme terhadap individu dan masyarakat secara luas. Kerugian yang disebabkan oleh praktik diskriminatif akan melanggengkan kesenjangan dan menurunkan kualitas hidup mereka yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarian, memerangi seksisme bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan sosial.

³⁰ Ashari, A. G., Antoni, H., & Rachma, M. N. (2024). Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Permasalahan Tindak Kekerasan yang Terjadi Pada Mahsa Jina Amini dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 1-14.

³¹ Brahmana, F. F. S., & Ramadi, B. (2023). DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 122-132.

Mahsa Amini menjadi pengingat yang tajam akan pentingnya moral untuk memerangi seksisme dalam segala manifestasinya. Hal ini menggarisbawahi kewajiban etis untuk menjunjung prinsip keadilan, rasa hormat, dan kesetaraan dalam konteks profesional dan sosial. Mengatasi seksisme tidak hanya membutuhkan reformasi hukum dan kelembagaan tetapi juga perubahan budaya menuju pengakuan dan perlawanan terhadap diskriminasi berbasis gender³². Dengan menghadapi permasalahan ini secara langsung dan mengembangkan lingkungan yang inklusif, kita dapat berjuang menuju masa depan dimana kesetaraan gender bukan sekedar aspirasi namun menjadi kenyataan bagi semua orang.

Pemeriksaan moral terhadap seksisme ini, yang dibingkai melalui kaca mata kasus Mahsa Amini, menyoroti relevansi dan urgensi pemberantasan diskriminasi gender dalam masyarakat kontemporer. Selagi kita bergerak menuju masa depan yang lebih adil, dengan tetap waspada dalam komitmen kita terhadap keadilan dan martabat semua individu, tanpa memandang gender. Dengan mempertimbangkan pemahaman tentang seksisme ini, implementasi kebijakan oleh pemerintah Iran dapat memiliki dampak merugikan terhadap perempuan, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketidakpekaan terhadap isu-isu tersebut, yang kemudian dapat berujung pada kekerasan, eksploitasi, penyebaran informasi yang salah, bahkan berakhir pada kematian. Hal ini dapat dilihat melalui contoh kasus tragis Mahsa Amini yang sendiri mengalami konsekuensi dari kekerasan tersebut.³³

³² Rahmi, A., Asmuni, A., & Nurashia, N. (2024). Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).

³³ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 61.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian/Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan mengolah satu atau lebih variabel secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik fenomena yang diteliti, serta konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.³⁴ Dalam konteks ini, metode ini diterapkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap Gerakan Penolakan Terhadap Seksisme di Iran pada tahun 2022.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi data non-numerik. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi kunci utama untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Moleong (2005) mengemukakan sembilan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dikategorikan menjadi empat

³⁴ N.S. Sukmadinata, *Pendekatan Kualitatif*, 2007.

aspek utama: yang pertama yakni perpanjangan keikutsertaan di lapangan penelitian kedua, dalam hal ketekunan pengamatan ketiga, triangulasi dengan sumber untuk membandingkan serta mengecek balik derajat kepercayaan suatu metode. Keempat, dalam hal pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Kelima, analisis kasus negatif. Keenam kecukupan referensial. Ketujuh pengecekan anggota dalam formal maupun informal yang berkenaan pengecekan kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Kedelapan, uraian rinci di dalam membangun keteralihan yakni uraian seteliti mungkin . dan yang kesembilan, yakni auditing yang dilakukan berdasarkan kriteria kepastian data mentah, dan data yang sudah direduksi, hasil sintesis, catatan proses , bahan catatan pribadi atau refleksi , motivasi , harapan dan ramalan.³⁵ Setelah data penting yang saling terkait terkumpul, langkah terakhir adalah menyusun data tersebut menggunakan teori yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif untuk mencapai kesimpulan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk buku dan website seperti jurnal, artikel online, serta portal berita resmi internasional yang terkait dengan Gerakan Mahsa Amini dalam menentang seksisme di Iran.

³⁵ Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *ALHADHARAH JURNAL ILMU DAKWAH* 17(33):81 (2019).

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak keluar dari pembahasan Rumusan Masalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang bagaimana Analisa Gerakan Mahsa Amini dalam menentang Seksisme di Iran dalam jangka waktu 2022-2023. Gerakan Mahsa Amini ini mulai terjadi pada tanggal 16 september tahun 2022 tepat di depan rumah sakit tempat dirawatnya Mahsa Amini. Gerakan ini juga di ketahui masih kerap melakukan protes pada genap setahun semenjak hari pertama dilakukan hingga tanggal 15 september tahun 2023.³⁶

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan kerangka teori gerakan sosial bahwasannya gerakan Mahsa Amini merupakan sebuah gerakan yang termasuk kedalam aspek organik yakni suatu kondisi di mana gerakan tersebut dilakukan secara spontan dan dilakukan secara serentak. Gerakan Mahsa Amini muncul sebagai bentuk simpati terhadap seorang wanita Kurdi yang meninggal dalam tahanan. Kematianya memicu kerusuhan terbesar dalam sejarah Iran, dengan demonstrasi yang spontan dan tidak terorganisir. Gerakan ini ditandai dengan aksi massa, kerusuhan, dan pemberontakan yang tidak memiliki pemimpin formal.

³⁶ Philip Yabut/Alamy, "Mahsa Amini: A Year into the Protest Movement in Iran, This Is What's Changed," <https://Theconversation.Com/>, last modified 2023, accessed November 6, 2023, <https://theconversation.com/mahsa-amini-a-year-into-the-protest-movement-in-iran-this-is-whats-changed-212661>.

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I : PENDAHULUAN</p>	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1Latar Belakang</p> <p>1.1. Rumusan Masalah</p> <p>1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian</p> <p>1.4. Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5. Kerangka Teori</p> <p>1.5.1 konsep perilaku kolektif</p> <p>1.5.3 Teori Seksisme</p> <p>1.6 Metodologi Penelitian</p> <p>1.6.1 Metode Penelitian/Tipe Penelitian</p> <p>1.6.2 Teknik Analisis Data</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Variabel Penelitian</p> <p>1.6.5 Metode Penelitian</p> <p>1.6.6 Batasan waktu</p> <p>1.7 Argumen Dasar</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II : Dinamika isu seksisme di Iran</p>	<p>1.2 Seksisme Di Iran</p> <p>1.2.1 Awal mula munculnya gerakan Mahsa Amini</p> <p>1.3 Proses Demosntrasi Gerakan Mahsa Amini</p> <p>1.4 Dampak Negatif Dari Gerakan Mahsa Amini</p> <p>1.4.1 Dampak terhadap pemerintah Iran</p>
<p>BAB III : Analisa Gerakan Mahsa Amini Dalam Menolak Seksisme Di Iran</p>	<p>3.1. Bentuk Protes Gerakan Mahsa Amini dalam Menentang Seksisme</p> <p>3.2. Pengaruh Protes Mahsa Amini terhadap undang-undang Iran</p> <p>3.3. Perilaku Kolektif Spontanitas Dalam Gerakan Mahsa Amini</p>
<p>BAB IV : PENUTUP</p>	<p>4.1Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>